



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANSASTRI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 454857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 739.850.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
5. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 32.100.000
6. Tanah Seluas 14775 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, LAINNYA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, CALYA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, DAIHATZU SIGRA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA

Rp. 600.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.092.460.434

F. HARTA LAINNYA

Rp. 1.900.000.000

Sub Total

Rp. 5.582.310.434



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.582.310.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.